

PROFIL ORGANISASI
KOMITE PEMANTAU LEGISLATIF (KOPEL)¹

Kantor Pusat : Jl. Batua Raya 9 No. 3 Makassar Telp. (0411)491041

A. Latar Belakang Berdirinya KOPEL

Komite Pemantau Legislatif yang selanjutnya disebut dengan KOPEL Sulawesi yang pada perkembangan selanjutnya berubah nama menjadi KOPEL Indonesia merupakan lembaga Non Government Organization (NGO) didirikan pada tanggal 10 Maret 2000 yang berkedudukan di Kota Makassar berdasarkan dengan Akte Notaris Widartiningsih Nomor 13 tertanggal 29 Mei 2000 yang selanjutnya diperbaharui dengan Badan Hukum Yayasan dengan nama “Yayasan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia” pada notaris yang sama dengan Nomor: 18 tertanggal 23 Mei 2019. Terdaftar pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 194/D.III.3/VIII/2009 dengan beberapa kali perpanjangan terakhir dengan nomor: 01-00-00/095/D.IV.1/XI/2015 tertanggal 16 November 2015.

KOPEL didirikan oleh sejumlah aktivis angkatan tahun 1998 yang terdiri dari mahasiswa dan jurnalist yang saat itu banyak melakukan peliputan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Latar belakang pendirian lembaga ini cukup sederhana, ingin melihat lembaga wakil rakyat berfungsi sebagaimana mestinya. DPRD sebagai wakil rakyat benar-benar difungsikan, tidak hanya sekedar stempel dan justifikasi sebuah kebijakan yang dipaksakan oleh eksekutif untuk disetujui oleh DPRD sebagai wakil rakyat. Fenomena ini terjadi pada masa Orde Baru. Di lain pihak, pasca reformasi dengan lahirnya berbagai kebijakan setelah tumbanganya Orde Baru, DPRD dipandang semakin kuat. Dengan kewenangan lebih yang diberikan kepada DPRD dengan kapasitas yang lemah akibat dari rekrutmen politik oleh partai politik dengan hanya mengandalkan ketokohan dengan suara terbanyak tapi minim kapasitas, mengakibatkan kekhawatiran di kalangan aktivis dan kelompok masyarakat sipil akan lahirnya berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat.

Berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, sejumlah jurnalist dan mahasiswa angkatan 1998 membentuk Komite Pemantau Legislatif yang kerap disebut KOPEL Sulawesi yang dalam perkembangannya berubah nama menjadi KOPEL Indonesia. Oleh karena, KOPEL sesuai dengan namanya mengkonsentrasikan diri pada perbaikan tata kelola pemerintahan agar menjadi lebih

¹ Update pasca penyusunan Renstra KOPEL Jakarta - Bogor, 11 – 14 Desember 2015

transparan, partisipatif dan akuntabel melalui penguatan dan pemantauan di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

B. Managemen dan Struktur Organisasi

KOPEL sebagai Bdan Hukum Yayasan memiliki managemen dan struktur organisasi sebagai berikut:

- I. Dewan Pembina
- II. Dewan Pengawas
- III. Dewan Pengurus

Dewan Pengurus Yayasan membentuk pengurus harian dan badan-badan khusus yang dipandang oleh yayasan penting untuk dibentuk.

1. Pengurus Harian, yang terdiri dari:

- Direktur Eksekutif
- Divisi Advokasi Kebijakan Pemerintahan Daerah
- Divisi Pendampingan Masyarakat Sipil
- Divisi Riset dan Pengembangan

2. Badan-Badan Khusus

- Sekolah Parlemen KOPEL Indonesia (Speksi);
- Media dan Lembaga Penerbitan;
- Lembaga Usaha Ekonomi, antara lain: usaha rental mobil, usaha sewa villa, area perkemahan/out bond, meeting dan rapat-rapat/pertemuan.

3. Pengurus Perwakilan

- DKI Jakarta
- Kota Bogor
- Kota Makassar Makasar
- Kabupaten Sinjai
- Kabupaten Bulukumba
- Kabupaten Tana Toraja
- Kabupaten Luwu Timur
- Kabupaten Bone
- Kota Ternate
- Kota Tidore Kepulauan

Melalui divisi-divisi tersebut di atas, KOPEL melakukan advokasi dengan melibatkan sejumlah stakeholder yang terkait. Gambaran umum kerja masing-masing divisi adalah sebagai berikut:

1. Divisi Advokasi Kebijakan Pemerintahan Daerah

Divisi ini melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah yang dalam prosesnya akan dinilai oleh DPRD melalui tiga fungsinya yakni pengawasan, keuangan dan Pembentukan Perda. KOPEL dalam hal ini akan memberikan masukan kepada anggota DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah dengan melihat pada aspek partisipasi, akses, control dan penerima manfaat dari sebuah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Melalui divisi ini, KOPEL berperan untuk membantu DPRD memberikan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran, manfaat dan dampak yang ditimbulkan atas kebijakan tersebut bagi kemajuan pembangunan maupun manfaat yang luas bagi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

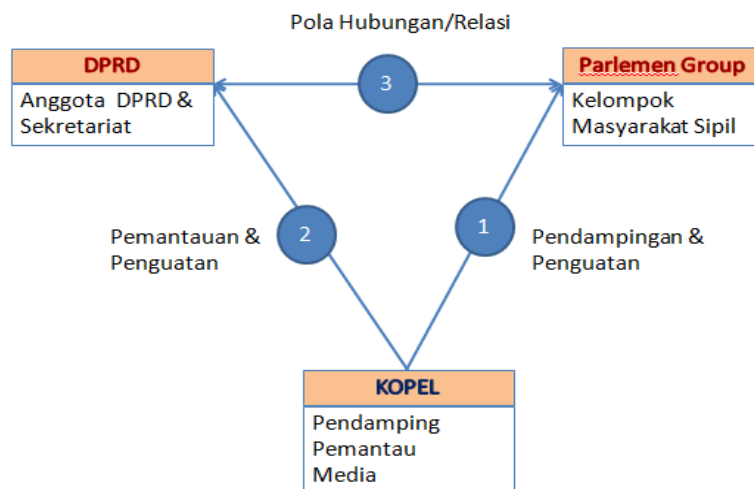
2. Divisi Pendampingan Masyarakat Sipil

Melalui divisi ini KOPEL melakukan kerja-kerja advokasi masyarakat sipil. Kerja advokasi ini dilakukan mengingat banyaknya permasalahan kebijakan pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil. Permasalahan lemahnya elemen masyarakat sipil membawa KOPEL pada suatu upaya pengorganisasian dan pendampingan masyarakat sipil. Sebagai bagian dari aktor atau pelaku perubahan (*agent of change*), pengorganisasian masyarakat secara terstruktur dan sistematis menjadi sesuatu yang mendesak untuk menjawab gejala melemahnya posisi warga dalam pengambilan keputusan publik. Dalam mengorganisir masyarakat sebagai kelompok dampingan, KOPEL selama ini secara khusus menggunakan istilah Parlemen Group.

Istilah Parlemen Group pertama kali digunakan oleh KOPEL Sulawesi pada tahun 2001 untuk penyebutan kelompok dampingan yang dibentuk di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Parlemen Group adalah wadah berkumpul dan berjuangya sekelompok masyarakat sipil – termasuk masyarakat petani dan nelayan, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat kurang beruntung (*disabled people*).

Bagi KOPEL, penggunaan istilah parlemen grup bagi masyarakat dampingan diterjemahkan sebagai bagian dari strategi atau ideologi gerakan yang sebenarnya berkeinginan menarik relasi dan komunikasi politik yang kuat dari lembaga parlemen dengan masyarakat sipil atau konstituennya. Begitu pula sebaliknya, untuk mendorong masyarakat sipil agar lebih peduli dan aktif membangun komunikasi sekaligus kontrol terhadap wakilnya di parlemen. Program-program penguatan masyarakat lewat Parlemen Group semangatnya adalah bagaimana menerjemahkan parlemen baik secara institusional maupun sebagai individu pemegang mandat rakyat yang seharusnya lebih dekat dengan suara batin dan emosional masyarakatnya. Dalam artian komunikasi politik antara masyarakat sebagai pihak yang diwakili dengan anggota parlemen sebagai pihak yang diwakili. Untuk komunikasi tersebut, KOPEL berperan sebagai intermediary antara keduanya.

PERAN INTERMEDIARY Strategi Advokasi



Untuk mendorong komunikasi antara masyarakat sipil dengan anggota DPRD, KOPEL memanfaatkan media sebagai bagian dari sasaran advokasi masyarakat sipil. Disamping sebagai target group, media juga dijadikan sebagai alat untuk membangun opini publik terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, melakukan desiminasi informasi terkait dengan kerja-kerja advokasi lembaga. Kampanye dan publikasi dilakukan melalui pers conferences dengan melibatkan media cetak, elektronik dan media-media alternatif lainnya berupa leaflet, brosur, stiker, baliho, pemutaran film, talkshow dan lain-lain.

KOPEL juga banyak memanfaatkan kerja sama yang telah terbangun selama ini dengan media baik sebagai narasumber berita, terlibat dalam program di media bersangkutan dan pola-pola keterlibatan KOPEL lainnya dalam mensuplai data dan berita untuk kepentingan pemberitaan media. Media-media tersebut antara lain Harian Fajar, Berita Kota, Rakyat Sulsel, Makassar TV, dan TVRI.

3. Divisi Riset dan Pengembangan

KOPEL melalui divisi ini melakukan serangkaian penelitian/riset untuk untuk kepentingan lembaga. Melalui riset, KOPEL terbantu untuk melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan advokasi kebijakan yang sedang dilakukan. Sehingga hasil-hasil advokasi semuanya berbasis data yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Oleh karena itu, riset yang dilakukan KOPEL dijadikan sebagai alat advokasi yang memudahkan setiap personil lembaga yang tersebar dalam setiap divisi dapat melakukan kerja-kerja organisasi secara baik, teratur, dan bertanggung jawab.

4. Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom

Badan-badan khusus/lembaga otonom adalah lembaga khusus yang berfungsi sebagai *fundraising* lembaga. Sepanjang lembaga-lembaga ini dibutuhkan, maka pengurus Yayasan dapat membentuknya. Badan-badan khusus/lembaga otonom yang ada hingga saat ini adalah:

- Speksi (Sekolah Parlemen KOPEL Indonesia);
- Lembaga Penerbitan;
- Lembaga Usaha Ekonomi, antara lain usaha rental mobil, usaha sewa villa, dan perkebunan/pertanian;
- Media www.kopel-online.or.id.

C. Daerah Sasaran Program

Sejak berdirinya tahun 2000, KOPEL telah bekerja di 12 wilayah provinsi dengan 46 sasaran kabupaten/kota di Indonesia. Enam wilayah propinsi tersebut antara lain:

1. Propinsi Sulawesi Selatan;
 - Kota Makassar
 - Kabupaten Gowa
 - Kabupaten Takalar
 - Kabupaten Bantaeng
 - Kabupaten Bulukumba
 - Kabupaten Sinjai
 - Kabupaten Bone
 - Kabupaten Wajo
 - Kabupaten Luwu Timur
 - Kabupaten Luwu Utara
 - Kabupaten Tana Toraja
 - Kabupaten Toraja Utara
 - Kota Pare-Pare
 - Kabupaten Barru
 - Kabupaten Pangkep
 - Kabupaten Maros
 - Kab. Jeneponto
2. Propinsi Sulawesi Utara;
 - Kabupaten Bolaan Mangondow
 - Kabupaten Minahasa Utara
 - Kabupaten Minahasa
 - Kabupaten Bitung
 - Kabupaten Sitaro
 - Kabupaten Sangihe
3. Propinsi Sulawesi Barat;
 - Kota Mamuju
 - Kabupaten Polman
4. Provinsi Sulawesi Tenggara
 - Kabupaten Wakatobi
 - Kab. Konawe Selatan
 - Kab. Buton Utara
 - Kab. Kolaka Utara
 - Kota Bau Bau
5. Propinsi Sumatra Utara;
 - Kota Medan
 - Kabupaten Karo
6. Provinsi Maluku Utara;
 - Kota Ternate
 - Kota Tidore Kepulauan
7. Propinsi Gorontalo;
 - Kabupaten Boalemo
8. Propinsi DI. Yogyakarta
 - Kabupaten Bantul
9. Propinsi Nusa Tenggara Timur
 - Kota Kupang
 - Kabupaten Ende
 - Kabupaten Manggarai Timur

- Kabupaten Alor
- 10. Provinsi DKI Jakarta
- 11. Provinsi Jawa Barat
 - Kota Bogor
 - Kabupaten Bogor
 - Kota Bandung
- 12. Provinsi Papua
 - Kota Jayapura
 - Kabupaten Jayapura
 - Kabupaten Jayawijaya
 - Kabupaten Mimika

D. Mitra Kerja Sama Lembaga

Selama berdirinya sejak tahun 2000, KOPEL telah membangun kerja sama program dengan berbagai lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, masing-masing:

- The British Councils
- Partnership for Governance Reform in Indonesia
- Perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia & Brunei Darussalam (European Union)
- National Democratic Institut (NDI)
- International Republican Institut (IRI)
- Local Government Support Program (LGSP) – USAID
- Demoractic Reform Support Program (DRSP) - USAID
- TIFA Foundation – Jakarta
- DPD Republik Indonesia
- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)
- Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA)
- Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP)
- Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3)
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
- The Asia Foundation (TAF)
- BASICS – Cida
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Kinerja – USAID
- Bandung Institut og Gofernance Studies (BIGS) Bandung
- Sentra Advokasi Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar) Sumatera Utara
- Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara
- Publika Manado Sulawesi Utara
- Yayasan Dian Rakyat Indonesia (YDRI) Sulawesi Utara
- Swara Parampuan (Swapar) Sulawesi Utara
- Yayasan Nusantara Sejahtera (YNS) Jakarta
- Aeticle 33 Jakarta
- Perguruan Tinggi/Universitas, antara lain:
 - Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar
 - Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) - Universitas Gajamada (UGM) Yogyakarta
 - Universitas Budiluhur Jakarta

- o Universitas Muhammadiyah Makassar
- o Universitas 45 Makassar
- o Universitas Negeri Makassar (UNM)
- o Universitas Patria Artha Makassar

PROGRAM & MITRA KERJA
Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi

TAHUN	NAMA PROGRAM KEGIATAN	MITRA PENDANAAN
23 Junli 2000	Forum rakyat menggugat DPRD Sulsel	Swadaya lembaga
2001	Publik Hearing RAPBD 2001 Sul-Sel	Swadaya lembaga
2001	Publik Hearing RAPBD 2001 Kota Makassar	Swadaya lembaga
28-29 September 2001	Workshop Transparansi Legislatif	British Council
Januari – Juni 2002	Responsibility DPRD terhadap dampak korupsi kepada masyarakat miskin	Partnership dan UNDP
2002	Publik Hearing RAPBD 2002 Sul-Sel	Swadaya lembaga
	Publik Hearing RAPBD 2002 Kota Makassar	Swadaya lembaga
2003 – 2004	Penguatan pemilih kritis: Mendorong masyarakat tani dan nelayan menjadi pemilih kritis sebagai hak keterwakilan dalam PEMILU 2004	Partnership dan UNDP
2003	Publik Hearing RAPBD 2003 Sul-Sel	Swadaya lembaga
2004	Publik Hearing RAPBD 2004 Sul-Sel	Sekretariat DPRD Sulsel
2004	Publik Hearing RAPBD 2004 Kota Makassar	Swadaya lembaga
2004 – 2006	Penguatan Parlemen dan Pemberdayaan institusi local di Sulawesi Selatan	Partnership dan Uni Eropa
28 – 29 April 2005	Konstituen meeting DPD: Mempertemukan kepentingan daerah dengan keterbatasan wewenang DPD	YAPPIKA
9 – 10 Agustus 2005	Konstituen meeting DPD: Mempertemukan kepentingan daerah dengan keterbatasan wewenang DPD	YAPPIKA
Desember 2004	Advokasi Tata Tertib DPRD sebagai akibat tersumbatnya aspirasi masyarakat	KKP (Koalisi Kebijakan Partisipatif) – YAPPIKA
Agustus 2004	Advokasi Tatib DPRD Makassar dalam rangka pembentukan Badan Kehormatan	KKP (Koalisi Kebijakan Partisipatif) – YAPPIKA
28 Februari 2005	Advokasi PERDA No. 5 tahun 2004 tentang penyertaan Modal PT. CAS	KKP (Koalisi Kebijakan Partisipatif) – YAPPIKA
Desember 2005	Seminar penguatan kelembagaan DPD – RI	Sekjen DPD – RI
April - Mei 2006	Penelitian Kapasitas NGO di Kabupaten Pangkep	LGSP-USAID
1 Juli 2006 – 31 Mei 2008	Partisipatory budgeting and expenditure tracking	NDI dan World Bank
2 Agustus 2007	FGD Peran Ideal DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	Sekjen DPD – RI

April – September 2007	Advokasi Kebijakan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Tingkat Nasional dan Regional	MP3 (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik) - YAPPIKA
1 Februari – 31 Juni 2008	Penelitian atas PERDA dan proses pembuatan hukum yang bertanggungjawab secara sosial di Kab. Bulukumba	PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)
15 Mei – 15 September 2008	Pembentukan Komisi Ombudsman Lokal Kota Makassar	Partnership
1 Juli – 30 September 2008	Asistensi CSO untuk Tracking Proyek Implementasi APBD Kabupaten Gowa	LGSP-USAID
15 September – 15 November 2008	Development of A Public Oversight Mechanism for Temporary Legislative Candidates List (DCS) for the City Council of Makassar and Gowa in South Sulawesi	Partnership
Desember 2008 – November 2010	Building Partnerships among Government, Parliament and Civil Society in Support for Pro-Poor and Gender Responsive Budget Initiatives in South Sulawesi	European Union to Indonesia and Brunei Darussalam
December – August 2009	Evaluation on Local Regulations in South Sulawesi Province	PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)
Januari – April 2009	Political Party Accountability And Constituent Outreach Program	International Republican Institute (IRI) –USAID
Mei – Juni 2009	collecting basic information and background of new elected provincial legislators year 2009-2014 in South Sulawesi Province under Free, Fair & Creditable 2009 Elections Through Targeted Democratic Political Parties	International Republican Institute (IRI) –USAID
26 – 28 Juli 2009	Training on Capacity Building for Woman Elected Legislator Candidate	International Republican Institute (IRI) –USAID
Juni – Agustus 2009	Political Party Accountability And Constituent Outreach Program	International Republican Institute (IRI)-USAID
20 Agustus 2009	Seminar Membedah carut marut daftar pemilih Pileg dan Pilpres 2009	Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)
Agustus – September 2009	Strengthening Political Institutions and Constituent Outreach	International Republican Institute (IRI)-USAID
Juli 2009 – Juni 2010	Program peningkatan fungsi pengawasan komisi-komisi DPRD Kota Makassar melalui advokasi anggaran oleh Kelompok Masyarakat Sipil terhadap pelaksanaan DAK Pendidikan	Yayasan TIFA
Desember 2010 – November 2012	Consolidation of Civil Society in Monitoring The Accountability of Local Budget	European Union to Indonesia and Brunei Darussalam
Desember 2009 – November 2011	Improvement of Living Conditions of the Poor and Disadvantaged People through Capacity Strengthening of Local Parliaments and Increase Participation of Civil Society in Local Planning and Budgeting	European Union to Indonesia and Brunei Darussalam

Februari 2011 – Januari 2012	Inisiasi pembentukan forum bersama DPRD Provinsi dan DPRD kab/kota dalam penguatan fungsi pengawasan DAK Pendidikan	TIFA
Mei – Desember 2011	Political Party Accountability And Constituent Outreach Program	IRI
April 2011 – Maret 2012	Program Building Better Budget for Women and the Poor (B3WP)	TAF_ CIDA
Mei - Agustus 2011	Study on Political Party Financing and Recruitment System	Partnership
Juli 2012 – Februari 2014	Strengthening Integrity and Accountability Program 2	USAID
2012 – 2014	Program Educating and Equipping the Future Justice Reformers	The Asia Foundation-USAID
April 2012 – Des 2013	Konsultan Peningkatan Kapasitas OMS provinsi di Wilayah Sulawesi	BASICS – CIDA
Juni 2012-Juni 2013	Mendorong Tata Kelola Manajemen Puskesmas yang transparan, partisipatif dan akuntabel dalam menjamin persalinan aman, inisiasi menyusui dini dan ASI Eksklusif	KINERJA-USAID
Oktober – November 2013	Analisis anggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran sector kesehatan Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Mimika dan Kota Jayapura Provinsi Papua	KINERJA-USAID
Desember 2013 – Desember 2014	Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penganggaran dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Berbasis Standar Layanan di Propinsi Papua	KINERJA-USAID
Desember 2013 – Oktober 2014	Advokasi Kinerja DPRD DKI Jakarta dan Relasinya dengan Pemilu 2014	Yayasan TIFA
November – Desember 2014	Melakukan penelitian atas pelaksanaan implementasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) DKI Jakarta.	Swadaya Lembaga, Kerja Sama Universitas Budiluhur dan Global Concern
Januari 2015 – Desember 2015	Learning from Smart Practices of Poor Women to Strengthen National Policies – Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Timur (Konsorsium Global Concern – KOPEL)	MAMPU - Ausaid
Agustus 2015 - Januari 2017	Pemantauan Pengadilan Tipikor Makassar	LeIP, ELSAM
2016 - Sekarang	Program advokasi Sekolah Aman di Kabupaten Bogor	YAPPIKA Action Aid
2016	Riset Privatisasi Pendidikan dan Kaitannya terhadap Akses Pendidikan Berkualitas di Kota Bogor.	Article 33
2016	Riset Privatisasi Pendidikan dan Kaitannya terhadap Akses Pendidikan Berkualitas di Kota Makassar.	Article 33

21 November 2017 - 28 Desember 2018	<i>Assistance to Local Governments to Promote Evidence-Based Policies</i> , Kota Ternate Maluku Utara	YAPPIKA - USAID
2018	Studi pencapaian visi Misi Gubernur Sulawesi Selatan akhir masa Jabatan	Swadaya Lembaga
16 February 2017 – 28 June 2019	Advokasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur	CEGAH USAID
2017	Jambore Pemuda Sulsel untuk membangun kebersamaan dan toleransi kerja sama Dinas Pemuda dan Olah Raga Sulsel	Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel
November 2018 - September 2019	<i>Assistance to Local Governments to Promote Evidence-Based Policies</i> , Kota Tidore Maluku Utara	YAPPIKA - USAID
Mei 2019	Studi Kapasitas Calon Legislatif terpilih hasil Pemilu 2019 Provinsi Sulawesi Selatan	Swadaya Lembaga
Januari - Desember 2019	<i>Assistance to Local Governments to Promote Evidence-Based Policies</i> , Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	YAPPIKA - USAID
Juni - Sekarang 2019	Advokasi Pelaksanaan Hak Angket DPRD Sulsel	Swadaya Lembaga

Atas kapasitas KOPEL Sulawesi, beberapa forum di tingkat regional maupun nasional dipercaya untuk memfasilitasinya, antara lain:

1. Fasilitasi Forum Sosialisasi PP 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Hotel Dinasti Kota Makassar
2. Fasilitasi forum Workshop Susunan dan Kedudukan anggota DPRD se – Sulawesi Selatan di Hotel Dinasti pada tanggal 25 – 26 2005 Kota Makassar.
3. Fasilitasi Forum Workshop Mekanisme Penyerapan Aspirasi yang Efektif bagi anggota DPRD se Sulawesi Selatan di Kota Malino 18 – 19 Juni 2005 .
4. Fasilitasi Forum Workshop Penyusunan Kebijakan yang Partisipatif bagi anggota DPRD Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan dan DPRD Propinsi di Kota Malino tanggal 22 – 25 Juli 2005.
5. Fasilitasi FGD Tata Tertib DPRD yang Partisipatif tahun 2005 di 9 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, antara lain Kota Makassar, Kabupaten Barru, Kota Parepare, Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Gowa.
6. Fasilitasi forum diskusi antar stakeholder atas pembahasan RAPBD Kota Parepare tahun 2005
7. Fasilitasi dan mediasi konflik pembahasan RAPBD di tubuh DPRD Kabupaten Selayar tahun 2006
8. Fasilitasi konstituen meeting anggota DPD – RI untuk daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2004 dan 2005 dilaksanakan masing-masing di Makassar, Pare-Pare (Sulsel) dan Polewali Mandar (Sulbar).
9. Fasilitasi penyusunan naskah amandemen UUD 45 untuk perluasan wewenang DPD – RI (Dewan Perwakilan Daerah – Republik Indonesia).

10. Fasilitasi training anggaran partisipatif oleh TII di Hotel Celebes Makassar pada tanggal 7 – 9 Juni 2008

Atas kapasitas tersebut, KOPEL Sulawesi bergabung ke dalam beberapa koalisi dan POKJA untuk advokasi, masing-masing:

1. Anggota Pokja UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP) Jakarta;
2. Anggota Pokja UU Pelayanan Publik yang diinisiasi oleh Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) Jakarta tahun 2006; dan,
3. Anggota Pokja UU Parpol, Pemilu, Susuduk tahun 2008 oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta;
4. Anggota KMAK (Koalisi Masyarakat Anti Korupsi) untuk advokasi kasus-kasus korupsi di Sulawesi Selatan sejak 2004 sampai sekarang.
5. KOPEL sebagai anggota tim inti Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka Indonesia (CSO Open Government Partnership - OGP) Indonesia;
6. KOPEL sebagai Host dalam Koalisi Masyarakat Pemantau DPRD. Hasil pantauan dishare kepada anggota Koalisi untuk advokasi bersama;
7. Tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada langsung yang hingga sekarang berlanjut untuk kawal Pilkada yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia;
8. Tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Anggaran untuk tolak dana aspirasi Rp 20 milyar pertahun setiap anggota DPR; dan,
9. Tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Save KPK.

Proses advokasi yang telah dilakukan KOPEL selama ini didokumentasikan melalui beberapa media publikasi, antara lain:

1. Tahun 2001, menerbitkan buku “Aspirasi Anda Kami Tampung”;
2. Tahun 2004 – 2005, menerbitkan news letter untuk penguatan DPRD dan pemberdayaan masyarakat dampingan KOPEL Sulawesi (Parlemen Group);
3. Tahun 2007, menerbitkan buku “Tata Tertib DPRD untuk Parlemen yang Amanah”;
4. Tahun 2007, menerbitkan buku yang berjudul “Korupsi di Parlemen; Daun-daunpun Berguguran”;
5. Tahun 2007, Menerbitkan buku yang berjudul “Saatnya Warga Kritis Anggaran”;
6. Tahun 2007, melakukan survey tentang kinerja DPRD Sulawesi Selatan dan menerbitkannya dalam bentuk buku yang berjudul “Menyorot Kinerja DPRD Sulsel”
7. Tahun 2007, bekerja sama dengan Pemerintah Kab Gowa mempublikasikan APBD dalam bentuk poster
8. Tahun 2007, bekerja sama dengan Pemerintah Kab Bulukumba mempublikasikan APBD dalam bentuk poster.
9. Tahun 2007, bekerja sama dengan Pemerintah Kab Takalar mempublikasikan APBD dalam bentuk poster.
10. Tahun 2007, bekerja sama dengan Pemerintah Kab Gowa mempublikasikan APBD dalam bentuk Booklet.
11. Tahun 2007, menerbitkan buku best practices advokasi masyarakat untuk berpolitik dengan judul “Parlemen Group di Sulawesi Selatan”
12. Kerja sama dengan Harian Fajar Makassar, Harian Berita Kota Makassar dan Gorontalo Post dalam publikasi hasil analisis APBD 2007 dan 2008 kab. Bulukumba, Kab. Gowa, Kab. Takalar dan Kab. Boalemo;

13. Tahun 2008, bekerja sama dengan Pemerintah Kab Gowa dalam Penerbitan Buku tentang Tracking anggaran yang berjudul "Mewujudkan Proyek tanpa Korupsi" ;
14. Tahun 2008, menerbitkan buku "Traffic Light APBD: Best Practices & Lesson Learned advokasi anggaran di Sulawesi"; dan
15. Tahun 2008, menerbitkan buku "Hak Dasar yang Terabaikan: Potret Pelayanan Publik di Sulawesi";
16. Tahun 2008, menerbitkan buku "Andai KOPEL adalah Sekolah" merupakan kumpulan hasil advokasi Parlemen Group dampingan KOPEL di daerah-daerah binaan.
17. Tahun 2009, menerbitkan buku "Kaya Janji Miskin Produk" yang merupakan hasil penelitian PERDA di Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Takalar.
18. Tahun 2009 - 2010, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar, Kabupaten Tana Toraja, Bantaeng, dan Luwu Timur mempublikasikan APBD dalam bentuk Poster dan Baliho untuk transparansi anggaran kepada publik.
19. Tahun 2009, menerbitkan buku "Pengawasan Terencana DAK Pendidikan (Panduan Teknis bagi DPRD)". Sebuah buku panduan pengawasan bagi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DAK di sekolah-sekolah.
20. Tahun 2011, menerbitkan buku "Antara Lebah dan Wakil Rakyat" Kumpulan tulisan karya terbaik siswa hasil lomba Karya Tulis siswa SMU Se Sulawesi Selatan tentang DPRD dan APBD.
21. Tahun 2011, menerbitkan buku "Masih Ada Keberpihakan: Pembelajaran Praktis DPRD di Tengah Ketidakpercayaan Publik". Hasil pendampingan DPRD di Kabupaten Bulukumba, Medan Karo dan Tidore Kepulauan.
22. Tahun 2011, menerbitkan Kalender Anggaran 2012.
23. Tahun 2012, Menerbitkan buku "Pengawasan Terencana Dana Pendidikan: Panduan Teknis.
24. Tahun 2013, menerbitkan buku "Saatnya Rakyat Tahu Anggaran: mengawal pentingnya partisipasi masyarakat dalam memonitoring pelaksanaan anggaran", sebuah buku praktis pemantauan APBD dan kumpulan belanja SKPD Kabupaten tanah Toraja tahun anggaran 2013. Diterbitkan atas kerja sama KOPEL dengan Pemerintah kabupaten Tana Toraja.